

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau. Sebagian besar wilayahnya, sekitar 65 persen dari total luas wilayahnya adalah perairan dengan garis pantai sepanjang 81.000 km (Gerungan, 2016). Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Berdasarkan data FAO tahun 2022, wilayah yang berpotensi memiliki sumber daya perikanan di Indonesia mencapai 26.606.000 ha (Anugrah *et al.*, 2021).

Sektor perikanan merupakan salah satu andalan yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia sebagai potensi untuk meningkatkan ekonomi di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pemanfaatan sektor ini belum terlaksana secara optimal dan sering kali dianggap sebagai bagian dari sektor pertanian, padahal Indonesia merupakan negara maritim dengan 65 persen wilayahnya berupa lautan. (Gumilar, 2022). Sektor perikanan berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia. Data BPS tahun 2023, kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023 sebesar 2,7 persen atau senilai Rp. 244,8 Triliun.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, potensi pelestarian sumber daya ikan diperkirakan mencapai 12.011.125 ton per tahun, yang terdiri dari berbagai jenis perikanan laut. Besarnya potensi sumber daya perikanan ini membutuhkan pengelolaan yang cermat dan berkelanjutan.

Gjerten (2005) menyatakan bahwa kegiatan penangkapan ikan yang tidak memperhatikan prinsip kelestarian dan keberlanjutan dapat menimbulkan masalah di masa depan (Gaurahman & Arka, 2020).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk memberdayakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru dalam menggerakkan pembangunan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Hal tersebut merupakan suatu paradigma baru yang menuntut efisiensi efektivitas dan percepatan pembangunan di segala sektor termasuk sektor kelautan dan perikanan untuk berpacu mengikuti laju perkembangan pembangunan. Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah laut adalah 12 mil bagi provinsi dan 4 mil bagi daerah kabupaten ataupun kota yang didalamnya terdapat sumber daya ikan (Suryawati, 2021).

Karakteristik wilayah dan potensi daerah yang dimiliki serta strategi pembangunan yang mendukung, maka sektor kelautan dan perikanan seharusnya menjadi primadona perekonomian dan berperan sebagai pendorong ekonomi untuk meningkatkan pendapatan wilayah. Provinsi Jawa Timur misalnya, berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah sebesar 47.799,75 km² dengan panjang garis pantai terpanjang di pulau jawa yaitu sepanjang 3.498,12 km². Selain luas wilayah yang dimiliki, Jawa Timur merupakan provinsi dengan angka konsumsi ikan tertinggi ketiga setelah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bengkulu. Hal tersebut masih kurang beriringan dengan jumlah produksi perikanan tangkap Provinsi Jawa Timur yang masih kurang optimal.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan Masyarakat (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999) maka dalam pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan daerah dituntut untuk dapat menggali potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan untuk peningkatan pendapatan daerah, maka kiranya perlu di analisis potensi ekonomi dari semua sektor, termasuk didalamnya adalah sektor perikanan. Diharapkan pada akhirnya dapat Menyusun perencanaan pembangunan di daerah secara efektif dan efisien sebagai modal pembangunan dalam mewujudkan Pembangunan wilayah.

Pembangunan ekonomi wilayah pada dasarnya melibatkan perubahan dalam struktur produksi serta alokasi sumber daya. Proses pembangunan di Kabupaten Sumenep mengikuti strategi pembangunan nasional yang menjadi acuan utama dalam penentuan arah pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada pengembangan potensi lokal secara optimal, menyeimbangkan laju pertumbuhan antardaerah serta mewujudkan pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan distribusi yang adil, karena kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab bersama seluruh agen ekonomi (Kaiso & Bhokaleba, 2021).

Kabupaten Sumenep memiliki potensi yang besar dalam sektor perikanan, sehingga dapat berperan dalam membangun perekonomian Kabupaten Sumenep. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumenep, potensi perikanan di Kabupaten

Sumenep sangat besar. Dengan jumlah pulau sebanyak 126 dan luas wilayah mencapai 2.093,47 km² dengan panjang garis pantai sebesar 577,76 km², potensi sumber daya lautnya sangat besar. Tercatat ada 170 desa yang aktif dalam kegiatan perikanan, dengan produksi perikanan tangkap yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan perikanan budidaya.

Tabel 1. 1. Produksi Perikanan Kabupaten Sumenep

Produksi Perikanan Sumenep		
Tahun	perikanan tangkap (ribu ton)	perikanan budidaya (ribu ton)
2019	48,53	3,73
2020	45,89	2,26
2021	44,32	2,94
2022	44,96	6,87
2023	41,02	7,54

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep

Berdasarkan Tabel 1.1 data produksi perikanan Sumenep periode 2019–2023, terdapat dua permasalahan utama yang dapat diidentifikasi. Pertama, terjadi penurunan produksi perikanan tangkap dari 48,53 ribu ton pada tahun 2019 menjadi 41,02 ribu ton pada tahun 2023. Penurunan ini dapat disebabkan oleh faktor seperti overfishing atau penangkapan ikan berlebih yang mengakibatkan berkurangnya stok ikan di perairan, kerusakan ekosistem laut akibat polusi atau perubahan iklim, serta praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit juga dapat menyebabkan berkurangnya jumlah nelayan aktif. Penurunan produksi ini berpotensi menurunkan pendapatan nelayan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di masa mendatang.

Kedua, produksi perikanan budidaya mengalami fluktuasi signifikan. Produksi sempat rendah di tahun 2020 dan 2021, masing-masing sebesar 2,26 ribu ton dan 2,94 ribu ton. Namun, produksi meningkat tajam pada tahun 2022 dan 2023, mencapai 6,87 ribu ton dan 7,54 ribu ton. Lonjakan ini kemungkinan

dipengaruhi oleh peningkatan infrastruktur, adopsi teknologi budidaya yang lebih efisien, serta dukungan dari pemerintah atau pihak swasta. Meski demikian, perikanan budidaya menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada kualitas air, risiko penyakit ikan, serta biaya produksi yang tinggi, khususnya untuk pakan.

Sektor perikanan tangkap di Kabupaten Sumenep memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Dengan potensi produksi yang terus bertumbuh, sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yang tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data BPS Kabupaten Sumenep tahun 2023 menyebutkan bahwa kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap Produk Domestik Regional Bruto sebesar 3,04 persen. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor perikanan tangkap juga berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PDRB sendiri merupakan indikator utama yang mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, semakin tinggi PDRB, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Selain itu, pertumbuhan ekonomi ini dapat digunakan untuk memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antardaerah (Sjafrizal, 2020).

Keberhasilan suatu pembangunan dilihat dalam analisis makro dapat diukur dari pembangunan pendapatan daerah. Pertumbuhan pendapatan Produk Domestik Regional Bruto menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan daerah termasuk dalam pembangunan sektor perikanan karena pertumbuhan PDRB mampu menunjukkan besarnya pendapatan masyarakat. Maka dari itu, usaha dalam meningkatkan peranan dan kontribusi suatu sektor terhadap PDRB harus terus dilaksanakan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melalui optimalisasi penggunaan sumber daya alam yang dimiliki. Pemanfaatan

sumber daya alam harus lebih di fokuskan pada sektor dan komoditas yang belum optimal diekplorasi. Pemanfaatan sumberdaya pembangunan diarahkan untuk mencapai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sebagai upaya mendorong perkembangan dan mempertahankan ekonomi yang dimiliki suatu daerah (Kusdiantoro *et al.*, 2019).

Maka dari itu skripsi dengan judul “Peranan Subektor Perikanan Tangkap dalam Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Sumenep” perlu untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah subsektor perikanan tangkap merupakan sektor basis di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimanakah pola pertumbuhan dan daya saing subsektor perikanan tangkap dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Sumenep?
3. Apakah subsektor perikanan tangkap merupakan sektor unggulan di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah subsektor perikanan tangkap merupakan sektor basis di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola pertumbuhan dan daya saing subsektor perikanan tangkap dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Sumenep.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah subsektor perikanan tangkap merupakan sektor unggulan di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Sumenep dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan strategis untuk mendukung pengembangan sektor perikanan.
- 2) Dapat membantu merancang program atau kebijakan yang mendukung kesejahteraan di Kabupaten Sumenep.
- 3) Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep akan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai penunjang utama sektor perikanan tangkap.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah wawasan dan literatur dalam kajian ilmu ekonomi wilayah dan perikanan, khususnya terkait kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap pembangunan wilayah.
- 2) Dapat dijadikan referensi atau dasar teoritis bagi penelitian selanjutnya mengenai sektor perikanan dan pembangunan wilayah.
- 3) Dapat membantu merumuskan model pembangunan wilayah yang berfokus pada optimalisasi sumber daya lokal, terutama sektor perikanan tangkap sebagai salah satu pendorong utama pembangunan wilayah.